

IMPLEMENTASI MODEL *LIMA BOTTOM LINES* PELAPORAN: PEMIKIRAN TERINTEGRASI SESUAI PELAPORAN TERINTEGRASI INVESTASI DAERAH UNTUK KOMUNIKASI CAPAIAN KINERJA TPB/SDG (STUDI PADA FUNGSI DAN PERAN KOORDINASI PELAPORAN DI PROVINSI KALIMANTAN SELATAN)

Syaiful Hifni ¹⁾; Rano Wijaya ²⁾; Atma Hayat ³⁾; Zakhyadi Ariffin ⁴⁾

Faculty of Economic and Business, University of Lambung Mangkurat, Banjarmasin,
Indonesia

Corresponding Author: syaiful.hifni@ulm.ac.id

ABSTRACT

This study examines the role of the five reporting bottom lines in explaining the implementation communication of sustainable development management accountability. The research design used mixed method, with unit analyses 155 respondents as stakeholders in the context of regional investment development management activities. Using path analysis tools, and with informational analysis for the data obtained through semi-structured interviews. The result showed for first structural equation which triple bottom line, governance bottom line and empowerment bottom line has relationship towards implementation integrated reporting <IR>. Then, in the second structural relationship showed the implementation of <IR>, triple bottom line, governance bottom line, and empowerment bottom line has relationship towards sustainable development management accountability. Within the achievement of SDGs within the 4 pillars from the 17 goals of the SDGs. Novelty: There is evidence that the five reporting bottom lines theory with a voluntary initiative with using 5 STAR reporting index also correspond to be applied within regional government organizations. This research is useful for regional government in meeting of the contemporary reporting systems, to strengthen accountability of regional action plans of regional governments as part of commitment to achieve sustainable development nationally and globally.

Keywords: five reporting bottom lines, implementation communication, integrated reporting, sustainable development management accountability

PENDAHULUAN

Pemerintah daerah di Indonesia memiliki mandatori dalam pemenuhan peran pelaksanaan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (TPB) (Pasal 15 Perpres 59, 2017) yang terkait manajemen investasi (UNCTAD, 2018; Per-BKPM, Nomor 20 Tahun 2020; UNCTAD,UN, 2021). Selaras dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) yang ditetapkan dalam lingkup nasional sebagai “roadmap” TPB/SDG menuju 2030 (Kementerian PPN/Bapennas, 2018), yang menjadi bagian kesepakatan global dalam pencapaian SDGs (UN, 2017). Hingga saat sekarang, diperlukan efektifitas implementasi (Nilsen, 2015) keterlibatan peran Gubernur dalam penerapan Rencana Aksi Daerah (RAD) dengan peran dari sub yurisdiksi peran Bupati/Walikota (Perpres 59 Tahun 2017).

Dalam memenuhi peran strategik dan fungsional dengan mengkomunikasikan informasi aspek keberlanjutan (Bennie et al., 2012; Alrazi et al., 2015; OECD, 2019) yang terkait dengan pelaksanaan manajemen investasi (OECD, 2014). Melalui komunikasi untuk capaian 17 SDGs (UN, 2017, UNCTAD, 2018) dengan 4 pilar TPB/SDG ke dalam target dan indikator (sdgs.bappenas.go.id, 2021).

Secara normatif, suatu implementasi komunikasi informasi diperlukan untuk suatu capaian kinerja akuntabilitas manajemen investasi dalam platform investor SDG. Melalui komunikasi, menyediakan data, informasi, dan wawasan tentang peluang investasi yang berpotensi untuk berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan berdasarkan wilayah, negara, atau sektor (UNDP, 2021). Sesuai fungsi pemerintah daerah dalam memenuhi koordinasi dan integrasi komunikasi informasi pembangunan berkelanjutan (Guarini et al., 2022). Melalui implementasi fungsi koordinasi manajemen pembangunan berkelanjutan yang terkait fungsi layanan sistem informasi investasi daerah (Peraturan BKPM, No. 9, 2017).

Secara fungsional, Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi berperan dalam implementasi fungsi evaluasi dan pelaporan manajemen investasi di daerah menuju pencapaian SDGs (PMDN, Nomor 25 Tahun 2021). Dalam mengkomunikasikan adanya keamanan ruang hidup, daya pulih produksi dan konsumsi masyarakat serta keberlanjutan fungsi ekologi (Perpres No 59 tahun 2017; Media Indonesia, 2019) dapat dipenuhi akuntabilitasnya. Namun, fakta menunjukkan adanya tantangan dalam upaya pemenuhan fungsi komunikasi informasi layanan investasi daerah. Dalam lingkup penerapan teknologi informasi, hal ini menunjukkan adanya tantangan penerapan sistem informasi investasi daerah bagi satuan kerja perangkat daerah (GRWU) di tingkat daerah, terkait pemanfaatan teknologi informasi yang belum optimal (Iswan, 2019). Selanjutnya terdapat tantangan dimana pada situs RIIS sebelumnya, informasi masih terbatas, dan sebagian besar daerah belum melakukan update data, sehingga informasi yang ada tidak dapat dijadikan acuan oleh investor (Dani, 2019).

Dalam mendukung kebijakan pengembangan dengan menerapkan solusi untuk meningkatkan investasi jangka panjang untuk SDG (UNDP, 2021). Secara normative, implementasi peran koordinasi Pemerintah Provinsi diperlukan melalui pengembangan kebijakan, regulasi, penyelarasan program/kegiatan, dengan dukungan penyiapan data dan informasi (Perpres 59 Tahun 2017). Memerlukan peran koordinasi sistem pelaporan terintegrasi melalui komunikasi informasi yang mengintegrasikan pelaporan secara berjenjang (Inobu, 2021). Komunikasi informasi dalam pencapaian tujuan yang sebaiknya tidak hanya dipandang sebagai pencapaian indikator semata secara parsial.

Secara umum, implementasi teori (Nilsen, 2015) diperlukan dalam bentuk teori, model dan kerangka kerja dalam konteks untuk pemenuhan jangkauan (reach), efektifitas, adopsi, implementasi

disain suatu sistem pelaporan. Untuk implementasi sistem informasi pada tingkat DPMPTSP sebagai koordinator dalam fungsi dan peran komunikasi pelaporan yang dijelaskan dengan konsep pemikiran terintegrasi (*integrated thinking*) yang selaras dengan pelaporan terintegrasi (*integrated reporting*) (WICI, 2013; IIRC, 2013). Dengan penerapan teori “the five reporting bottom lines” menggunakan dasar motivasi penerapan indeks pelaporan 5-STAR (Ratnatunga and Jones, 2012, Ratnatunga, 2022). Suatu pemenuhan dalam implementasi terkait informasi apa yang penting diintegrasikan dan bagaimana pendekatan mengintegrasikan dan mengkomunikasikan informasi. Secara normative, suatu disain sistem informasi diimplementasikan dengan mengacu pada *implicit continency model* dari suatu sistem informasi manajemen organisasi (Weil and Olson, 2008), dengan mengadopsi disain model keberhasilan pengukuran sistem informasi (DeLone and McLane, 2016) untuk entitas Pemerintah Provinsi.

Sesuai *road map* penelitian ini, penelitian sebelumnya menunjukkan fakta empirik dari suatu Implementasi Model Sistem Pelaporan Terintegrasi untuk manajemen pembangunan berkelanjutan pada lingkup entitas Kabupaten (Hifni *et al.*, 2022). Fakta penelitian *Integrated Reporting, Sustainable Development Goals and the Role of Regional Information System* (Hifni *et al.*, 2021a) dan fakta penelitian *The Convergent Path and Contingent Role as an Initiative To Effective Environmental Reporting in Indonesia* (2021b) dalam lingkup nasional. Sejumlah penelitian dengan tema manajemen investasi, pembangunan berkelanjutan, dan sistem informasi dikemukakan. Terkait fakta empirik adanya “*Wetland Loss Through Sustainable Development*” (Aghmiuni *et al.*, 2019; Bernal, dan Netzer, 2020). Fakta terkait “*Halt biodiversity loss forest areas*” (Goal 15 Infographic, UN, 2020), serta adanya dampak biaya sosial yang dihadapi dari suatu investasi (Jones, 2012; Artie, 2019). Adanya dampak manajemen investasi ini menjadi tantangan dalam konteks global untuk pengelolaan investasi dalam promosi investasi secara efektif (UNCTAD, 2018). Fakta, meskipun semakin banyak penelitian untuk memperkirakan modal dan biaya operasional untuk mencapai berbagai target SDG terkait secara individual dan kolektif, gambaran tentang perkiraan total kebutuhan investasi pada skala global belum dilakukan sejak penerapan SDGs pada tahun 2015 (Kulkarni *et al.*, 2022).

Berdasarkan uraian pada latarbelakang masalah dari usulan penelitian ini, untuk pemenuhan implementasi dengan adopsi model (Nilsen, 2015) diperlukan penelitian lanjutan untuk menjadi bagian kelengkapan *road map* penelitian yang terus diimplementasikan. Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang menjadi fakta empirik penelitian dalam lingkup nasional dan lingkup Kabupaten. Pentingnya penelitian pada lingkup Provinsi Kalimantan Selatan adalah sebagai pemenuhan fungsi koordinasi komunikasi manajemen pembangunan berkelanjutan di regional Kalimantan Selatan terkait

dengan integrasi komunikasi pada lingkup nasional. Dalam mengacu pada kebutuhan pencapaian RoadMap SDGs di Indonesia (Bappenas, RI, 2017).

Penting untuk diteliti bagaimana implementasi teori dari model lima *Bottom Lines* pelaporan dengan indek pelaporan 5 STAR (Ratnatunga and Jones, 2012; Ratnatunga, 2022) dengan dasar pemikiran terintegrasi (integrated thinking) sesuai pelaporan terintegrasi (integrated reporting) (WCI, 2013; IIRC, 2013) untuk implementasi komunikasi akuntabilitas manajemen pembangunan berkelanjutan (UN, 2017). Dalam lingkup penelitian pada fungsi koordinator pemerintah Provinsi dalam komunikasi manajemen pembangunan berkelanjutan di regional Provinsi Kalimantan Selatan. Penelitian ini dikemukakan dengan judul: “Implementasi Model *Lima Bottom Lines* Pelaporan: Pemikiran Terintegrasi Sesuai Pelaporan Terintegrasi Untuk Komunikasi Akuntabilitas Manajemen Pembangunan Berkelanjutan (Studi Pada Fungsi Koordinator Pelaporan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan)”.

METODE PENELITIAN

Tipe Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan menggunakan uji statistik parameterik (Hair et al., 2006) menggunakan alat analisis jalur (Path Analysis). Tujuan utamanya adalah mendapatkan pemahaman yang baik dari berbagai perspektif tentang fenomena yang diteliti. Melalui pemeriksaan silang data, setidaknya dari dua sumber atau metode dan menilai relevansinya. Dalam pemenuhan model prediksi sistem pelaporan terintegrasi dalam bentukan dan manfaatnya.

Metode Penelitian

Populasi dan Sampel

Populasi sasaran penelitian ini adalah stakeholders manajemen SDGs lingkup Kalimantan Selatan. Meliputi pemerintah : Satuan kerja perangkat daerah (SKPD) Pemerintah Kabupaten Provinsi/kabupaten/Kota; Akademisi, Entitas Bisnis, dan NGO. Daftar kerangka sampel penelitian ini (Tabel 1) ditetapkan mengacu pendekatan kecukupan jumlah sampel terhadap jumlah indicator dalam variable penelitian.

Tabel 1 Kerangka sampel dan proporsi sampel penelitian

No	Klasifikasi subjek	Kerangka Populasi Sasaran *)	Kerangka unit sampel
1	DPMPPTSP Provinsi	1	14
	DPMPPTSP Kabupaten/Kota di	13	
2	Investor:		68
	PMDN	701	
	PMA	83	
3	Perguruan Tinggi/Akademisi		67
4	NGO	10	67
	Jumlah		360

(Sumber, diolah, 2023)

Kecukupan kerangka sampel penelitian ini mengacu pada pemenuhan syarat sampel melalui perkalian 5-10 dikali 36 jumlah indikator (Tabel 2) dari 5 variable penelitian (Hair *et al.*, 2006), yaitu batas minimal sampe (5 x 36) dan maksimal (10 x 36) sampel. Sesuai kerangka sampel penelitian ini memiliki *relevant range* untuk kecukupan sampel sejumlah batas minimal 135 unit sampel sampai batas maksimal 270 unit sampel. Pendekatan judgment sampling dilakukan untuk penetapan sampel penelitian dengan proporsi sampel 43 % untuk 155 sampel dalam batas *relevant range* yang ada.

Variabel Penelitian dan Pengukuran

Definisi operasional variabel dan pengukurannya disajikan pada Tabel 2 berikut.

Tabel 2 Variabel dan pendekatan pengukuran

Tipe variable	Deskripsi variabel dan indikator	Pengukuran
Independen	X.1. Triple bottom lines (TBL) sebagai identifikasi dan pengumpulan output informasi melalui triple bottom lines <i>Economic, Environmental, Social</i> , dalam komunikasi tujuan dan ukuran menggunakan kerangka pengendalian pelaporan (Ratnatunga and Jones, 2012; IIRC, 2013; WICI, 2013; Ratnatunga, 2022). Diukur dengan menggunakan 15 dari kerangka kerja pengendalian indek pelaporan 5 STAR : (1) Informasi laporan keuangan dan audit (2) Informasi kemampuan (3) Informasi nilai produk (4) Informasi analisis keuangan (5) Informasi audit keuangan (6) Informasi ekspektasi social (7) Informasi perlindungan kesehatan dan keselamatan (8) Informasi peta jalan praktek sosial (tenaga kerja dan gender) (9) Informasi pengembangan <i>supply chain</i> (10) Informasi patner bisnis (11) Informasi nilai tambah lingkungan (12) Informasi kepatuhan pengendalian lingkungan (13) Informasi upaya perlindungan keanekaragaman hayati (14) Informasi kepatuhan aktifitas dan regulasi (15) Informasi untuk kemajuan syarat keberlanjutan lingkungan.	Interval
	X.2. Tata kelola –bottom line (TTBL) sebagai implementasi tujuan organisasi melalui kebijakan internal, sistem dan proses dengan kerangka kerja pengendalian pelaporan (Ratnatunga and Jones, 2012; WICI, 2013; Ratnatunga, 2022). Diukur dengan menggunakan 5 indikator dari kerangka kerja pengendalian indek pelaporan 5 STAR: (1) Informasi nilai tambah tata kelola (2) Informasi peran manajemen dan responsibilitas (3) Informasi prioritas untuk pengambilan keputusan (4) Hubungan anggota manajemen dan efektivitas manajemen (5) Hubungan remunerasi dengan kinerja organisasi	Interval
	X3. Pemberdayaan –bottom line (PBL) sebagai implementasi proses di mana individu dan kelompok mendapatkan kekuatan, akses ke sumber daya dan kontrol atas tingkat intrapersonal dan pemberdayaan antarpribadi mereka. Dengan kerangka kerja pengendalian pelaporan untuk menggunakan informasi yang disediakan dan bertindak seperti pemilik ceruk mereka dalam organisasi (Ratnatunga and Jones, 2012; Ratnatunga, 2022). Diukur dengan 5 indikator dari kerangka kerja pengendalian indek pelaporan 5 STAR: (1) Informasi nilai tambah pemberdayaan (2) Pemberdayaan penggunaan informasi dengan pengambilan keputusan (3) Penyediaan informasi untuk inovasi manajemen (4) menghilangkan pembatasan pemberdayaan karena prosedur kontrol dalam sistem pelaporan (dalam regulasi) (5)	Interval

	Informasi capaian dan/atau kemajuan dalam ukuran dan tujuan keberlanjutan	
Intervening	Y1: Implementasi sistem pelaporan terintegrasi investasi daerah (ISPT-ID) sebagai pemenuhan dan pelengkapan proses pelaporan terintegrasi dan laporan terintegrasi (WICI, 2013, IRC, 2013, 2018, 2019) Diukur dengan 5 indikator: (1) Pemenuhan persyaratan utama (key requirements) pelaporan (2) Pemenuhan konsep dasar (fundamental concepts) pelaporan (3) Pemenuhan prinsip panduan (guiding principles) pelaporan (4) Pemenuhan elemen konten (content elements) pelaporan (5) Laporan terintegrasi sesuai kriteria bentuk dan isi informasi.	Interval
Dependen	Y2: Komunikasi informasi hasil capaian SDGs /TPB (Y ₂) (KIHC-SDG/TPB) sebagai pencapaian komunikasi nilai kinerja hasil dalam klasifikasi 17 SDGs yang diukur dalam 6 indikator capaian dari klasifikasi tujuan pelaporan terintegrasi (IIRC, 2018, 2019), klasifikasi <i>soft capital</i> : (1) Financial (2) manufacture (3) natural, dan <i>hard capital</i> (4) social (5) human (6) intellectual terkait SDGs (Ratnatunga and Jones, 2012; UN, 2017; Ratnatunga, 2022)	Interval

(Sumber, diadaptasi, sesuai sumber referensi, 2022)_

Metode Pengumpulan data

Sesuai konteks triangulasi data, penelitian ini menggunakan beberapa teknik pengumpulan data untuk memenuhi kumpulan data penelitian. Untuk menjawab pertanyaan penelitian terkait hipotesis penelitian. Serta menjawab pertanyaan terkait bagaimana implementasi tujuan dalam Efektifitas komunikasi capaian SDGs dapat diimplementasikan.

Metode Survei

Pengumpulan data penelitian dengan metode survei dilakukan dengan kombinasi pendekatan (i) mengirimkan daftar pertanyaan dalam format “google Form” dan (ii) mengkomunikasikan langsung kuesioner kepada responden, untuk mendapatkan pengukuran data untuk kebutuhan pengujian hipotesis penelitian.

Wawancara

Dalam kebutuhan data kualitatif untuk mengetahui dan memahami bagaimana tujuan SDGs/TPB dicapai sesuai “kerangka konseptual penelitian” diimplementasikan. Digunakan metode wawancara dengan *key person*/narasumber. Wawancara dilakukan dengan semi terstruktur menggunakan daftar pertanyaan terbuka terkait aspek-aspek dalam implementasi manajemen investasi daerah yang akuntabel. Terkait aspek-aspek secara teknis, administrative, relasi sosial dalam perspektif manajemen strategik. Wawancara juga dilakukan dengan kebutuhan data kualitatif terkait aspek-aspek implementasi dalam bentuk informasi tambahan dan kredible yang didapat selama wawancara (Tabel 3).

Tabel 3 Ringkasan Pihak Interviewees

Pseudonym		Year
B1	Secretary of One-stop Integrated investment service office	2023
B2	Secretary of Regional Development Planning Agency	2023

B3	Head of Economocs and Development of Regional Secretariat	2023
B4	Head of Legal section of Regional secretariat	2023
B5	Head of Regional Inspectorate	2023
B6	Head of Subdivision of Trials and treatise of Provincial Council Secretariat	2023
B7	Sub Coordinator for the Development of Regional Owned Enterprises and Regional Public Service Agencies - Tanah Laut Regency	2023
B8	Head of the Environmental Service - Tanah Laut Regency	2023

(Source, processed, 2023)

Metode Observasi

Pendekatan dengan metode observasi terkait teknik pengumpulan data yang bersifat “cross sectional” dilakukan dengan melakukan pengamatan secara langsung di lapangan. Metode ini dilakukan untuk mendapatkan data pengamatan terhadap skema manajemen investasi di daerah (DPMPTSP Kabupaten/Kota dan DPMPTSP Provinsi) melalui sistem pelaporan terintegrasi yang diimplementasikan. Informasi yang didapatkan melalui metode observasi ini digunakan untuk menelaah bagaimana relasi sosial dalam kaitan aspek ekonomi, aspek sosial, aspek lingkungan dalam tataran teknis, operasional, regulasi, waktu pelaksanaan, serta capaian kinerja. Memberikan informasi untuk deskripsi bagaimana implementasi akuntabilitas manajemen investasi daerah diimplementasikan mencapai SDGs/TPB melalui peran koordinasi pelaporan terintegrasi di tingkat Provinsi.

Metode Analisis Data

Untuk menetapkan hubungan sebab akibat mengacu pada model penelitian, apakah data konsisten dengan model (Streiner, 2005). Penelitian ini menggunakan analisis jalur untuk menilai 2 (dua) hubungan struktural. Model analisis jalur digunakan untuk menilai keberterimaan model yang diuji dalam penelitian. Penelitian ini untuk menguji semua variabel independen terhadap variabel intervening (Y1), dan untuk menguji variabel independen dan variabel intervening terhadap variabel dependen (Y2). Oleh karena itu, spesifikasi model untuk memenuhi bukti penelitian disajikan dalam 2 (dua) hubungan struktural berikut: (i) $ISPT (Y_1) = p_{Y_1 X_1} TBL + p_{Y_1 X_2} TKBL + p_{Y_1 X_3} PBL + \varepsilon_1$; dan (ii) $KIHC-SDG/TPB (Y_2) = p_{Y_2 Y_1} ISPT + p_{Y_2 X_1} TBL + p_{Y_2 X_2} TKBL + p_{Y_2 X_3} PBL + \varepsilon_2$

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

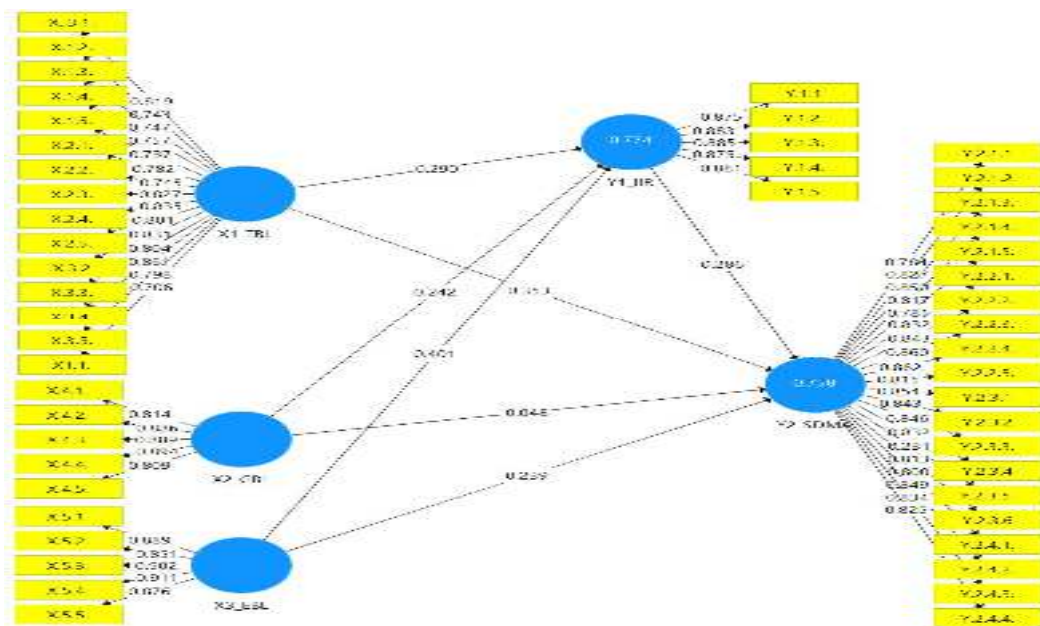
Analisis Deskriptif

Table 4 Validity and Reliability of variables

	Cronbach's Alpha	rho_A	Composite Reliability	Average Variance Extracted (AVE)
X1_TBL	0.963	0.963	0.967	0.66
X2_GBL	0.922	0.922	0.942	0.764
X3_EBL	0.948	0.951	0.96	0.828
Y2_SDMA	0.98	0.98	0.981	0.726
Y1_IR	0.942	0.943	0.956	0.812

Hypothesis Testing

Hasil pengujian hipotesis H01 sampai H07 dikemukakan dalam 2 persamaan struktural.



Gambar 1 Model for 2 (two) structural relationships (Source, processed, 2023)

Seperti terlihat pada Gambar 1, hasil hubungan struktural pertama mempunyai nilai signifikansi yaitu: (i) terdapat hubungan triple bottom line, governance bottom line, dan pemberdayaan bottom line terhadap implementasi konvergensi pelaporan keberlanjutan <IR>. Untuk hubungan struktural kedua juga mempunyai nilai signifikan yaitu: (ii) konvergensi pelaporan keberlanjutan penerapan <IR>, triple bottom line, governance bottom line, dan pemberdayaan bottom line menuju akuntabilitas pengelolaan pembangunan berkelanjutan.

Hasil pengujian persamaan struktural pertama

Hasil pengukuran koefisien korelasi pada persamaan struktural pertama disajikan pada Tabel 5.

Tabel 5 Path coefficient of first Structural Relationship : X₁, X₂, X₃ towards Y_{1(IR)}

Variable	Direct influence by correlation	Total rounding from model
----------	---------------------------------	---------------------------

	X1	X2	X3
TBL (X1)	0.290		
GBL (X2)		0.242	
EBL (X3)			0.401
Total influence of variables X1, X2, X3 towards Y1			0.942
Total influence of residual variables towards Y ₁			0.058
Total			1.00

(Sources, reprocessed from output of Lisrel estimate-path analysis, LISREL 8.80,)

Hasil pengujian hipotesis berdasarkan Tabel 5: (i) H01 dapat ditolak, menunjukkan adanya pengaruh TBL terhadap penerapan pelaporan terintegrasi <IR> dengan koefisien korelasi sebesar 0,290; (ii) H02 dapat ditolak yang menunjukkan adanya pengaruh GBL terhadap IIR dengan koefisien korelasi sebesar 0,242; dan (iii) H03 dapat ditolak yang menunjukkan terdapat pengaruh EBL terhadap implementasi <IR> dengan koefisien korelasi sebesar 0,401. Berdasarkan model, terdapat error gangguan model sebesar 0,058.

Spesifikasi model dalam persamaan struktural kedua dan pertama:

$$ISPT(IIR) (Y_1) = 0.290 p_{Y_1 X_1} TBL + 0.242 p_{Y_1 X_2} TKBL (GBL) + 0.401 p_{Y_1 X_3} PBL (EBL) + 0.058 \epsilon_1:$$

Hasil pengujian persamaan struktural kedua

Hasil pengukuran korelasi pada persamaan struktural kedua disajikan pada Tabel 6.

Tabel 6 Path coefficient of Second Structural Relationship : IIR- Y1, X1, X2, X3 towards Y2 (SDMA)

Variables	Direct influence by correlation				Total rounding from model
	Y1	X1	X2	X3	
IIR	0.286				
TBL		0.353			
GBL			0.048		
EBL				0.239	
Total influence of variables Y1, X1, X2, X3 towards Y2					0.926
Total influence of residual variables towards Y2					0.074
Total					1.00

(Sources, reprocessed from output of Lisrel estimate-path analysis, LISREL 8.80,)

Hasil pengujian hipotesis sesuai Tabel 6: (1) H04 dapat ditolak yang menunjukkan adanya pengaruh IIR terhadap SDMA dengan koefisien korelasi sebesar 0,286; (ii) H05 dapat ditolak, terdapat pengaruh TBL terhadap SDMA dengan koefisien korelasi sebesar 0,353, (iii) H06 dapat ditolak, terdapat pengaruh GBL terhadap SDMA dengan koefisien korelasi sebesar 0,048; (iv) H07 dapat ditolak yang berarti terdapat pengaruh EBL terhadap SDMA dengan koefisien korelasi sebesar 0,239. Berdasarkan model terdapat error gangguan model sebesar 0,074.

Spesifikasi model dalam persamaan struktural kedua

$KIHC-SDG/TPB-SDMA(Y_2) = 0.286 pY_2 Y_1 ISPT(IIR) + 0.353 pY_2 X_1 TBL + 0.048 pY_2 X_2 TKBL(GBL) + 0.239 pY_2 X_3 PBL(EBL) + \epsilon_2$

Pembahasan

Sesuai dengan hasil pengujian pada persamaan struktural pertama, dan pada persamaan struktural kedua, menunjukkan keselarasan hasil dengan fakta empiris sebelumnya, dan juga menyisakan perbedaan hasil penelitian ini dengan fakta empiris lainnya. Hasil uji persamaan struktural pertama menunjukkan bahwa aspek triple bottom line berperan dalam penerapan sistem pelaporan terintegrasi. Terdapat kejelasan proses dan tujuan mulai dari aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan sebagai dimensi pelaporan keberlanjutan (GRI), aspek tata kelola dalam memenuhi peran “paradigma pelaporan informasi”, serta aspek pemberdayaan sebagai “paradigma berpengaruh”. yang menerima pentingnya pelaporan untuk memenuhi nilai-nilai kinerja dalam dimensi pelaporan (Ratnatunga dan Jones, 2012). Memberikan penguatan penerapan pelaporan terintegrasi dalam komunikasi aspek konten pelaporan dan format pelaporan (IIRC, 2018; 2019). Mengkomunikasikan aspek pelaporan keberlanjutan yang sama dengan aspek pelaporan terintegrasi (ekonomi, sosial, lingkungan hidup), dengan tambahan komunikasi sumber daya manusia dan hubungan sosial, manufaktur, dan hak kekayaan intelektual (IIRC, 2013).

Pada hasil uji persamaan struktural kedua, aspek implementasi pelaporan terintegrasi dengan lima aspek pelaporan bottom line memberikan dampak terhadap efektivitas komunikasi pencapaian kinerja SDGs dalam 4 lapisan. Kepatuhan terhadap “SDMA” dan tahapan pelaporan terpadu dipenuhi sesuai bentuk dan isi pelaporan yang mengkomunikasikan aspek pembangunan berkelanjutan (IIRC, 2018; 2019). Ada penguatan aspek economic bottom line dalam format (laporan nilai pemegang saham) dengan menggunakan ukuran-ukuran khas sebagai pernyataan dalam pelaporan ekonomi. Peran garis bawah kemasyarakatan (laporan sosial), di bawah pelaporan sosial, garis bawah ini fokus pada bidang program pemangku kepentingan, seperti pengembangan komunitas lokal dengan kemasyarakatan yang terkait dengan organisasi. Kemudian, dalam peran garis bawah lingkungan (green report), menggunakan dua pendekatan pelaporan lingkungan yang meliputi: (1) akuntansi biaya untuk kegiatan pengelolaan lingkungan yang sedang berlangsung, dan (2) evaluasi investasi terkait lingkungan (Ratnatunga, 2022). Konsep governance bottom line (laporan akuntabilitas), dapat mendukung untuk menerjemahkan pemikiran terpadu menjadi pelaporan terpadu, dengan pandangan holistik terhadap prospek tata kelola (WICI, 2013). Tata kelola teknologi informasi diterima sebagai pentingnya mendukung sistem pelaporan untuk memenuhi nilai-nilai kinerja dalam dimensi tata kelola dalam pelaporan (Ratnatunga dan Jones, 2012; Ilmudeen dan Malik, 2016). Konsep pemberdayaan bottom line (laporan motivasi) sebagai garis bawah yang berfokus pada proses dimana individu dan kelompok memperoleh kekuasaan, akses terhadap sumber daya dan kendali atas kehidupan mereka

sendiri yang berhubungan dengan organisasi secara internal dan eksternal (Ratnatunga dan Jones, 2012).

Hasil wawancara semi terstruktur dengan pemerintah daerah pada posisi perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan SDG (B1; B2; B3; B4; B5) menunjukkan adanya kebenaran korespondensi dalam model penelitian. Adanya pragmatisme terhadap model penelitian di pemerintah daerah sejalan dengan praktik pelaporan SDGs melalui laporan rencana aksi daerah. Dalam pelaporan SDGs melalui pelaporan kemajuan investasi daerah [...] “Pihak Kabupaten/Kota melaporkan kegiatan investasi daerah melalui laporan kemajuan investasi secara berkala”. Target rencana investasi daerah dapat tercapai, namun target yang ditetapkan pemerintah pusat untuk daerah belum tercapai (B1). Wawancara lain: [...] “Aspek tata kelola dan pemberdayaan sebenarnya merupakan kewajiban yang melekat pada pemerintah, peran kualitas sistem pelaporan menentukan keberhasilan pencapaian komunikasi kinerja organisasi” (B6). [...] “Yang penting terkait implementasi adalah fungsi koordinasi didukung oleh kualitas sistem yang baik untuk kualitas pelaporan pemerintah” (B7). Selanjutnya [...] “Pelaksanaan pelaporan aspek SDG terkait tantangan akuntabilitas pencapaian indikator SDG yang dilaporkan secara faktual” (B8).

KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian, pertanyaan yang diajukan dijawab dengan fakta-fakta: 1. Proses akuntabilitas apa yang diperlukan untuk melacak kemajuan suatu negara dalam berkontribusi terhadap SDGs. dan, 2. Struktur tata kelola nasional tambahan apa saja yang dapat mendukung proses penciptaan nilai yang selaras dengan pencapaian SDGs. Penelitian ini dikemukakan berdasarkan teori legitimasi dan pemangku kepentingan antara pemerintah daerah dan investor daerahnya (DI/FI) dengan pemangku kepentingan SDGs.

Penelitian ini menunjukkan bahwa lima aspek pelaporan bottom line (Ratnatunga dan Jones, 2012, Ratnatunga, 2022) berperan dalam penerapan sistem pelaporan dan komunikasi kinerja organisasi dalam lingkup pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. Peran TBL dan GBL berpengaruh terhadap penerapan sistem pelaporan terintegrasi secara proporsional, sedangkan aspek EBL mempunyai peranan yang lebih signifikan dalam penerapan sistem pelaporan terintegrasi. Sementara itu, peran aspek pelaporan terpadu dan lima aspek pelaporan bottom line dipenuhi dengan tingkat signifikansi yang berbeda-beda, dimana aspek EBL memiliki signifikansi paling rendah dalam pencapaian dan komunikasi SDMA dalam sistem pelaporan SDG di pemerintah daerah. Manfaat teoritis dari hasil penelitian menunjukkan kejelasan peran pada perspektif teori legitimasi dan teori pemangku kepentingan (Ratnatunga dan Jones, 2012; Beske et al., 2020). Hasil penelitian ini juga selaras dengan penerimaan aspek faktor kontingensi keberhasilan sistem informasi atau sistem

pelaporan dengan dampak sistem pelaporan terhadap komunikasi kinerja organisasi (Weill dan Olson, 2008; DeLone dan McLane, 2016). Implikasi dari studi ini juga selaras dengan fakta bagaimana SDGs dikomunikasikan secara nasional dan menjadi bagian dari akuntabilitas SDGs Global. Sesuai dengan fakta empiris kajian nasional dan global terhadap aspek SDGs (Hifni et al., 2021a; Aghmiuni et al., 2019; Kulkarni et al., 2022).

DAFTAR PUSTAKA

- Aghmiuni, S Samaneh, Nockrach, Minnoka, Kalantari, Zahra. 2019. *The potential of wetlands in achieving the Sustainable Development Goals of the 2030 Agenda*, ResearchGate, Water 11 (3), MDPI, DOI: 10.3390/w11030609, www.mdpi.com/journal/water
- Adams, A Carol, 2020, Sustainable Development Goals Disclosure (SDGD) Recommendations: Feedback on the consultation responses; http://www.integratedreporting.org/wp-content/uploads/2020/01/Adams_2020_Feedback-on-the-consultation.pdf (sitasi, Sabtu, 28 Januari 2022, jam 9.15 AM).
- Artie W Ng. 2019. Socially Responsible Investing in Sustainable Development, *Encyclopedia of Sustainability in Higher Education*, Publisher: Springer, DOI: [10.1007/978-3-319-63951-2_301-1](https://doi.org/10.1007/978-3-319-63951-2_301-1)
- Ara Musarrat., & DR. Harani B. 2020. Integrated Reporting Insight: Why Organisation Voluntary Reports ?, *International Journal of Scientific & Technology Research*, Volume 9, Issue 01, ISSN 2277-8616, www.ijstr.org
- ADB, UN Environment (2019). Strengthening the Environmental Dimensions of Sustainable Development Goals in Asia Pacific Tool Compendium, DOI: [HTTP//DX.DOI.ORG/10.22617/TIM190002-2](https://dx.doi.org/10.22617/TIM190002-2)
- Alrazi, Bakhtiar., De Villers Charl., Van Staden, Chris J. (2015). A comprehensive literature review on, and the construction of a framework for, environmental legitimacy, accountability and proactivity, *Journal of Cleaner Production*, Doi: 10.1016/J.JCLEPRO.2015.05.022
- Bernardi, Cristiana and Stark, W Andrew. 2016. Environmental, social and governance disclosure, integrated reporting, and the accuracy of analyst forecasts; *The British Accounting Review*; <http://dx.doi.org/10.1016/j.bar.2016.10.001>; Elsevier Ltd, www.elsevier.com;
- Bennie M Nonna., Frost, Geoff., Soh, S.B. Dominic. 2012. Assurance on Sustainability Reporting : State of Play and Future Direction, Contemporary Issues in *Sustainability Accounting, Assurance and Reporting*, Emerald Group Publishing Limited, ISBN: 978-1-78052-020-9
- Bernal, Blanca and Netzer, Mike. 2020. *Fighting Wetland Loss Through Sustainable Development*, <https://winrock.org/voices/page/2/>
- Black Sun Plc. 2014. Integrated Reporting, *Realizing the benefits: The impact of Integrated Reporting*, www.blacksunplc.com; www.theiirc.org

- Baldini M, Maso D Lprenzo, Liberatore G, Mazzi, F. 2018. Role of Country- and Firm Level Determinants in Environmental, Social, and Governance Disclosure, *J Bus Ethics*, 150, pp 79-98, https://doi.org/10.1007/s_10551-016-3139-1
- Burke J Jenna, and Clark E Cynthia. 2016. The business case for integrated reporting: Insight from leading practioners, regulators, and academics; *Business Horizon* (1276), No. of pages 11, ScienceDirect: www.elsevier.com/locate/bushor
- BKPM, Direktorat Pengembangan Potensi Daerah. 2017. Laporan Akhir Penyusunan Peta Potensi dan Peluang Invesasi daerah, Penyusun PT Abdi Nusa Kreasi, Jakarta
- BKPM. 2018, National Single Window for Investment (NSWI), 2018, Organized by BKPM, <https://nswi.bkpm.go.id/sitemap>
- BKPM. 2019. Strategi Pengembangan Potensi Daerah dalam Meningkatkan Iklim Investasi, Direktur Pengembangan Potensi Daerah, Berinvestasi Remarkable Indonesia; <http://dpmpptsp.riau.go.id/media/file/Strategi-Pengembangan-Potensi-Daerah-Dalam-Peningkatan-Iklim-Investasi.pdf>
- Calder J. Bobby., Phillips W. Lynn., Tybout M. Alice. 1981. Designing Research for Application, *Journal of Consumer Research*, Vol. 8, No. 2 (Sep., 1981), pp. 197-207 (11 pages), Published By: Oxford University Press, <https://www.jstor.org/stable/2488831>
- Conover, W.J. 1980. *Practical Nonparametric Statistics*, 2nd Edition, John Wiley & Sons, New York.;
- Dani J. Akhir. 2019. Masalah ini Bikin Investor Pikir-Pikir Investasi di Indonesia, Jum'at 04 Oktober 2019 22:15 WIB; <https://economy.okezone.com/read/2019/10/04/320/2113052/masalah-ini-bikin-investor-pikir-pikir-investasi-di-indonesia>
- Dumay, C John and Dai, Tim. 2017. Integrated thinking as a cultural control ?; *Meditari Accountancy Research*, <https://doi.org/10.1108/MEDAR-07-2016-0067>
- Daryaei, Najmeh., Mirdamadi, Mehdi., Hosseini F Jamal., Soureh R Samad., Arjomandi, Reza. 2014. Development of Economic, Social and Environmental Sustainability Indicators of Fereydoon Kenar International Wetland Site (Ramsar Site) by using Delphi Method, *MAGNT Research Report*, Vol. 2 (6) PP: 504-524 (ISSN. 1444-8939)
- Duran D. Cristian., Gogana, L. Maria., Artenea, Alin., Durana, Vasile. (2015). The components of sustainable development - a possible approach, *Procedia Economics and Finance* 26, pp. 806 – 811, doi: 10.1016/S2212-5671(15)00849-7
- ElAbbassi, Ahmed., Khalid, Chafik. 2014. The Decision to Invest in Information System: Case of Adopting in The Moroccan Public Largest Companies, *International Journal of Computer Application*, 88 (15) pp 49-54; DOI: 105120/15432-4050
- Frias, Aceituno J.V., Ariza, L. Rodríguez., Sanchez, I.M. García. 2013. *Is integrated reporting determined by a country's legal system? An exploratory study*, *Journal of Cleaner Production*; Elsevier; <http://dx.doi.org/10.1016/j.jclepro.2012.12.006> www.elsevier.com
- Global Reporting Initiative (GRI). 2018a. GSBB, GRI 101: Foundation 2016, GRI Standards, www.globalreporting.org

..... 2018b. GSBB, GRI 103: Management Approach 2016, GRI Standards, www.globalreporting.org

..... 2018c. GSBB. GRI 203: Indirect Economic Impact; www.globalreporting.org

[Guarini, E.](#), [Mori, E.](#) and [Zuffada, E.](#) (2022), "Localizing the Sustainable Development Goals: a managerial perspective", *Journal of Public Budgeting, Accounting & Financial Management*, Vol. 34 No. 5, pp. 583-601. <https://doi.org/10.1108/JPBAFM-02-2021-0031>

[Hamad, S.](#), [Lai, F.W.](#), [Shad, M.K.](#), [Khatib, S.F.A.](#) and [Ali, S.E.A.](#) (2022), "Assessing the implementation of sustainable development goals: does integrated reporting matter?", *Sustainability Accounting, Management and Policy Journal*, Vol. ahead-of-print No. ahead-of-print. <https://doi.org/10.1108/SAMPJ-01-2022-0029>

(Cite, 23th January 2023, 12.18 AM)

Hair J.E., Andersson R.E., Tatham R.L., Black W.C. 2006. *Multivariate Data Analysis*, New Jersey: Prentice-Hall International.

Hifni, Syaiful. 2017. Antecedent Factors in the Implementation of Accounting System and Performance of Information System (A Case in Readiness to Success Accrual Base of Financial Reporting in South Kalimantan – Indonesia), *International Journal of Finance and Accounting*,6(1):19-36, DOI: 10.5923/j.ijfa.20170601.04

Hifni, Syaiful., Sayudi, Akhmad., Hayat, Atma. 2018. Peran Akuntansi Keberlanjutan: Auntabilitas dalam Ekologi, Sosio, dan Ekonomi. Prosiding Seminar Lahan Basah, LPPM, ULM, p-ISSN:2623-1611 & e-ISSN: 2623-1980

Hifni, Syaiful. 2018. Perkembangan Sistem Pelaporan, Penelitian, Menuju Implementasi Sistem Pelaporan Terintegrasi, Lambung Mangkurat University Press, ISBN: 978-602-6483-73-7

Hifni, Syaiful., Sayudi, Akhmad., Sa'roni, Chairul., Ichsan, M. 2019. Penelitian Potensi Investasi Unggulan Kabupaten tanah laut Tahun 2019, Laporan Penelitian , Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Universitas Lambung Mangkurat dengan Dinas Penanaman Modal & Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM & PTSP) Kabupaten Tanah Laut, 2019,

Hifni, Syaiful., Sayudi, Akhmad., Hayat, Atma., Wijaya, Rano. 2020. The Five Reporting Bottom Lines Within Implementation of Information Systems for Higher Education Institutions : A Voluntary Initiative, *Proceeding - The ICE-BEES International Conference*, 2020, Unnes, Semarang, Indonesia

Hifni, Syaiful., Sayudi, Akhmad., Hayat, Atma., Kadir, A., Wijaya, Rano. 2021a., Integrated Reporting, Sustainable Development Goals and The Role of Regional Information System, *Universal Journal of Accounting and Finance* 9 (3), 362-371, DOI: 10.13189/ujaf.2021.090310,<http://www.hrpub.org>

Hifni, Syaiful., Sayudi, Akhmad., Wijaya, Rano., 2021b, Intgegrated Reporting <IR> Implementation: The Convergent Path and Contingent Role as an Initiative To Effective Environmental Reporting in Indonesia, The 2nd IFBE and The 7th ISWEM, Banjarmasin

- Howell D.C. (2011) Chi-Square Test: Analysis of Contingency Tables. In: Lovric M. (eds) *International Encyclopedia of Statistical Science*, [https://doi.org/10.1007/978-3-642-04898-](https://doi.org/10.1007/978-3-642-04898-04898-)
- Huber, Betty Moy; Comstock, Michael; Polk, Davis; Wardwell, LLP. 2017. ESG Reports and Ratings: What They Are, Why They Matter, Harvard Law School Forum on Corporate Governance;
[file:///C:/Users/USER/Desktop/ESG%20Reports%20and%20Ratings %20What%20They%20Are,%20Why%20They%20Matter.html](file:///C:/Users/USER/Desktop/ESG%20Reports%20and%20Ratings%20What%20They%20Are,%20Why%20They%20Matter.html) (Sitasi, 6 Februari 2023, Jam 7..26 PM).
- Iswan, Uray. 2018. Sistem Informasi Potensi Investasi Daerah (SIPID), <https://kalbarprov.go.id/berita/sistem-informasi-potensi-investasi-daerah-sipid.html>
- International Integrated Reporting Committee (IIRC), 2011, *Towards Integrated Reporting: Communicating Value in the 21st Century*, International Integrated Reporting Council, London. www.theiirc.org;
- 2013. *Consultation Draft of the International <IR> Framework*, International Integrated Reporting Council, London; www.theiirc.org/consultationdraft2013.
- 2018. *Breaking Through IIRC Integrated Report 2017*, web: www.integratedreporting.org
- (2019). *Building Momentum*, IIRC
Integrated Report 2018, https://integratedreporting.org/integratedreport2018/index_desktop.html
- International Organization for Standardization (IOS). 2004. *ISO 14001:2004, Environmental Management Systems*, International organization for Standardizations, Geneva, www.iso.org
- Jones, Hannah. 2010. *Sustainability reporting matters: what are national governments doing about it ?*, ACCA, The Association of Chartered Certified Accountants, London
- Jones, Stewart. 2012. *Sustainability Reporting and Assurance : State of Practice*, Chapter 1, *Contemporary Issues in Sustainability Accounting, Assurance and Reporting*, Emerald Group Publishing Company, ISBN 978-1-78052-020-9
- Kristianus, Arnoldus. 2019. Investor Daily Indonesia, LIMA PROVINSI MASIH JADI FOKUS INVESTASI BKPM Hadirkan Sistem PIR untuk Dorong Pemerataan Investasi/arnoldus.kristianus@beritasatunedia.com/Investor.id
- Kulkarni S, Hof A, Ambrósio G, Edelenbosch O, Köberle AC, van Rijn J, et al. (2022) Investment needs to achieve SDGs: An overview. *PLOS Sustain Transform* 1(7): e0000020. <https://doi.org/10.1371/journal.pstr.0000020>;
<https://journals.plos.org/sustainabilitytransformation/article?id=10.1371/journal.pstr.0000020>
- Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, 2017, *Roadmap of SDG Indonesia: A Highlight*, <https://www.unicef.org/indonesia/media/1626/file/Roadmap%20of%20SDGs.pdf> (Sitasi, Minggu, 29 Januari 2023, jam. 11.25 AM).

- KPMG, 2018, How to report on the SDGs- What good looks like and why it matters, <https://assets.kpmg/content/dam/kpmg/xx/pdf/2018/02/how-to-report-on-sdgs.pdf> (sitasi, Sabtu 28 Januari 2022, jam 9.10 AM)
- LPPM, ULM. 2023. *Panduan Pelaksanaan Penelitian, Program Dosen Wajib Meneliti (PDWM) Sumbre Dana PNPB Universitas Lambung Mangkurat*
- Malmberg, FB. 2002. Environmental Management Systems, Commuicative action and organizational learning, *Business strategy and the environment*, vol. 11, No 5, pp 312-321
- Media Indonesia, 2019, Pemerintah Daerah Berperan Strategis dalam Pencapaian SDGs, <https://apps.mediaindonesia.com/read/detail/233224-pemerintah-daerah-berperan-strategis-dalam-pencapaian-sdgs>
- Myrtidis, Aris., Weerakkody, Vishanth. 2008. A Study of Information Systems Investment Evaluation in Greek Banking Sector, *Information Technology for Development*, Vol 14 (1) 11-30, DOI: 10.1002/itdj.20085, <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.1002/itdj.20085>
- Ministry of national Development Planning, 2017, RoadMap of SDGs Indonesia: A Highlight, <https://www.unicef.org/indonesia/media/1626/file/Roadmap%20of%20SDGs.pdf>
- Nilsen, Per. 2015. Making sense of implementation theories, models and frameworks, *Implementation Science*, Debate Open Access, 10:53, DOI 10.1186/s13012-015-0242-0
- OECD. 2014. *Effective Public Investment A Cross Levels of Government Principles for Action*, <http://www.oecd.org/effective-public-investment-toolkit/> Pebruari 2023, Jam 12.45 PM)
- pwc, 2019, PwC's SDG Challenge 2019; <https://www.pwc.com/gx/en/services/sustainability/sustainable-development-goals/sdg-challenge-2019.html> (sitasi, Sabtu, 28 Januari 2023, 8.35 AM)
- Pineiro Aliana; Dithrich, Hannah; Dhar Arti. 2018. *Financing The Sustainable Development Goals: Impact Investing in Action*, *Global Impact Investing Network (GIIN)*, <https://thegiin.org/research/publication/financing-sdgs>
- Payne, C. 2008. *So much reform, so little change: the persistence of failure in urban schools*, Cambridge: Harvard Education Press.
- Rankin, Michaela; Stanton, Patricia; McGowan, Susan; Ferlauto, Kimberly; Tilling, Matthew. 2012. *Contemporary issues in accounting*, Jhon Wiley & sons Australia, Ltd, ISBN- 978 0 730 300267
- Ratnatunga, Janek; Jones, Stewart. 2012. A Methodology to rank the Quality and Comprehensiveness of Sustainability Information Provided in Publicly Listed Company Report, Chapter 10, *Contemporary Issues in Sustainability Accounting, Assurance and Reporting*, First Edition, Edited By Jones Stewart and Ratnatunga Janek, Emerald Group Publishing Company, ISBN 978-1-78052-020-9
- Ratnatunga, Janek. 2022, Escaping the ESG Reporting Maze – Prioritise on Emissions Only, ESG Reporting, <https://cmaaustralia.edu.au/ontarget/escaping-the-esg-reporting-maze-prioritise-on-emissions-only/> (Cited, 24 January 2023, 9.30 AM)

- RMIT University and CPA Australia, 2021, Research Report, SDGs Measurement and Disclosure 3.0, A Study of ASX 150 Companies; <https://www.cpaaustralia.com.au/-/media/project/cpa/corporate/documents/tools-and-resources/environmental-social-governance/research-report-sdg-measurement-and-disclosure-3-0.pdf?rev=36189bdc57ce43bb8a3dc11b831c5fbf>
- Roger, Simnet., and Anna, Huggins. 2015. Integrated reporting and assurance: Where can research add value ?, *Sustainable Accounting, Management and Policy Journal*, 6 (1) pp 29-53, <https://eprints.qut.edu.au/85015>
- Sayudi, Akhmad., Hifni, Syaiful., Sa'roni, Chairul. 2016. Faktor-Faktor Pengembangan Organisasi Untuk Implementasi Sistem pelaporan Terintegrasi Sektoral (Studi Pada Pemda Di Kalimantan Selatan), LPPM ULM, Kemristek Dikti,
- Slaper, F. Timothy and Hall, J. Tanya. 2011. The Triple Bottom Line: What Is It and How Does It Work?, *Indiana Business Research Center* , Spring; Volume 86, No. 1; <https://www.ibrc.indiana.edu/ibr/2011/spring/article2.html>
- United Nation (UN). 2017. The Sustainable Development Agenda; <https://www.un.org/sustainabledevelopment/development-agenda-retired/>
- United Nations (UN). 2019. Department of Economic and Social Affairs. GSDR 2019, Global Sustainable Development Report, 2019. The Future is Now: Science for Achieving Sustainable Development, <https://sustainabledevelopment.un.org/globalsdreport/2019>
- Universitas Lambung Mangkurat. 2016. Rencana Induk Penelitian Universitas Lambung Mangkurat 2016-2020 <http://lppm.ulm.ac.id/id/wp-content/uploads/2016/10/Dokumen-RIP-2016-LPPM-1.pdf>
- Universitas Lambung Magkurat (ULM). 2019. SK Rektor ULM, Nomor 1521/UN8/KP/2019, Tentang Rencana Induk Pengembangan Universitas Lambung Mangkurat 2010-2027, <https://ulm.ac.id/id/wp-content/uploads/2019/01/RIP-2010-2027.pdf>
- Universitas Lambung Mangkurat (ULM). 2019. Rencana Strategik (Renstra) Universitas Lambung Mangkurat Tahun 2020-2024, <https://ulm.ac.id/id/dokumen-rip-renstra-dan-lakip/>
- United Nations (UN). 2020. Department of Economic and Social Affairs Sustainable Development. SDG 15. Goal 15 infographic, source: <https://unstats.un.org/sdgs/report/2020/>, <https://sdgs.un.org/goals/goal15>
- UNDP, 2021, Global Investment for Sustainable Development In Partnership with [GISD Alliance](https://sdginvestorplatform.undp.org/), Explore Investment Opportunities that Advance Humankind; <https://sdginvestorplatform.undp.org/>; <https://www.gisdalliance.org/> (Sitasi, Selasa, 28 Pebruari 2023, jam 13.30 PM)
- UNCTAD, UN. 2018. Promoting Investment In The Sustainable Development Goals, Investment Advisory Series, Series A, Number 8; <http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/igo/>
- UNCTAD, UN, 2021, Investment Advisory Series, Series A, Number 9, Investing in The Sustainable Development Goals: The Role of Diplomat, https://unctad.org/system/files/official-document/diaepcb2021d1_en.pdf (Sitasi, Selasa, 28 Pebruari, Jam 13.00 PM).

Wijaya, Rano. 2017. Analisis Rantai Nilai (Value Chain) Industri Komoditi Kelapa Sawit di Kalimantan Selatan, PNBPN, FEB ULM

World Intellectual Capital Initiative (WICI). 2013. *Connectivity: Background Paper for <IR>*, International Integrated Reporting Council, London. <https://examples.theiirc.org/>

Web:

sdgs.bappenas.go.id, 2021, Dokumen Rencana Aksi Daerah, 30 Dokumen rencana aksi daerah (RAD); https://www.myqnapcloud.com/share/6fdh20jk4l6p70846636116b_050238693j6629rq195691301670e03h#/home/RAD%20SDGs (Sitasi, 10 Februari 2023, jam 5.16 AM)

Lindungihutan. Editor LindungiHutan., Pebruari, 2022. 10 NGO dan Yayasan Lingkungan Paling Terkenal di Indonesia; <https://lindungihutan.com/blog/10-ngo-dan-yayasan-lingkungan-di-indonesia/> (Sitasi, 1 maret 2023, Jam 10.36 AM).

DPMPSTP-Kalimantan Selatan. Pebruari 2023, REALISASI INVESTASI PMA & PMDN TRIWULAN IV DAN JANUARI – DESEMBER 2022; <https://dpmptsp.kalselprov.go.id/web/wp-content/uploads/2023/02/Realisasi-Investasi-TW-4-Tahun-2022.pdf> (Sitasi, 1 Maret 2023, jam 10.47 AM)

Peraturan Perundang-undangan (Diacu dalam Proposal penelitian)

Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perijinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012, tentang Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM)

Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah

Peraturan Kepala BKPM Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Penanganan Pengaduan Masyarakat Di Pelayanan Terpadu Satu Pintu BKPM

Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Sistem Pelayanan Informasi dan Perijinan Investasi Secara Elektronik

Peraturan Kepala BKPM Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Konfirmasi Status Wajib Pajak Dalam Pelayanan Perijinan dan NonPerijinan Pada Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pusat di BKPM

Peraturan Kepala BKPM, Nomor 9 tahun 2017 Tentang Pedoman dan Tata Cara Pelaksanaan Kegiatan Pengembangan Iklim Penanaman Modal

Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal RI, Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal.